

5 (Lima) Citra

Manusia Perhubungan

- 1. Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.**
- 2. Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Jasa Yang Tertib, Teratur, Tepat Waktu, Bersih Dan Nyaman.**
- 3. Tangguh Menghadapi Tantangan**
- 4. Terampil Dan Berperilaku Gesit, Ramah, Sopan Serta Lugas**
- 5. Tanggungjawab Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Jasa Perhubungan.**

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Para peserta Rakornis Bidang Perhubungan Darat yang saya hormati,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan YME, atas segala karunia dan limpahan rahmatNya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali di Shangri-La Hotel Surabaya, Jawa Timur, untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2013, yang kali ini mengangkat tema : **“Perkuatan dan Pemberdayaan Potensi Institusi Pusat dan Daerah dalam rangka Peningkatan Kinerja di Bidang Perhubungan Darat”**

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan tujuan untuk membangun dan mempererat tali silaturahmi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan sistem tertransportasi yang handal, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Menjadi suatu kebahagian tersendiri bagi saya, untuk dapat bertemu dan bertatap muka dengan Saudara-saudara sekalian, para Kepala Dinas Perhubungan dari seluruh Indonesia, yang merupakan mitra Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang transportasi. Harapan kami, dengan diselenggarakannya Forum ini, jalinan silaturahmi dan komunikasi antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terjalin dengan baik dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, sehingga segala hambatan dan tantangan dalam mebangun transportasi dapat kita atasi dengan cerdas dan cermat. Akhirnya, saya ucapkan selamat mengikuti Rapat, semoga apa yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Teknis ini dapat menambah ilmu, wawasan dan khasanah piker kita dalam berkarya guna mewujudkan system transportasi yang lebih baik sesuai harapan masyarakat luas.

Semoga pula apa yang telah, sedang dan akan kita upayakan senantiasa mendapat ridho dari ALLAH SWT. Amiin

Selamat bekerja.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Buku Panduan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Bidang Perhubungan Darat Tahun 2013 dapat diterbitkan, sebagai acuan bagi Para Peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Rakornis. Buku panduan ini berisikan informasi tentang organisasi persidangan, jadwal acara, tata tertib dan daftar peserta Rakornis.

RAKORNIS Bidang Perhubungan Darat, diselenggarakan dari tanggal 2 s.d 4 Oktober 2013 di Shangri-La Hotel, Surabaya, Jawa Timur, diharapkan dapat terselenggara dengan aman, lancar dan dapat memberi manfaat bagi para peserta dan masyarakat pada umumnya.

Pada kesempatan ini Panitia Pelaksana mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada semua pihak yang telah berperan serta sejak dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan Rakornis ini.

Selanjutnya tak lupa pula Panitia Pelaksana menyampaikan permohonan maaf sekiranya dalam penyelenggaraan Rakornis ini terdapat kekurangan dan hal-hal yang tidak diharapkan.

Selamat mengikuti Rakornis.

Surabaya, 2 Oktober 2013

**PANITIA
RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2013**

ttd

KETUA PANITIA

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan di bidang perhubungan darat semakin hari semakin kompleks sekaligus dihadapkan pada tantangan strategis yang perlu disikapi untuk menjawab harapan masyarakat terhadap kinerja di bidang perhubungan darat yang lebih baik. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat, dinamika politik lokal daerah dengan adanya otonomi daerah serta berbagai perkembangan dan perubahan yang sangat cepat harus diimbangi dengan upaya perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan kinerja yang memadai sehingga mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan serta mampu merespon setiap tantangan dan perubahan dengan baik.

Salah satu indikator penilaian kinerja bidang perhubungan darat saat ini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukan bahwa kinerja di bidang perhubungan darat masih belum cukup memuaskan. Untuk mencapai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih diperlukan upaya perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan kinerja yang lebih serius.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan kinerja dari setiap unit kerja di bidang perhubungan terkait dengan tata kelola pembangunan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Upaya dimaksud tidak saja terkait pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus disertai dengan pelaksanaan kebijakan secara konsisten serta komitmen yang kuat dari setiap pemangku tanggung jawab di bidang perhubungan darat.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan institusi di bidang perhubungan baik di pusat maupun daerah dapat menjawab dinamika persoalan sekaligus tantangan yang ada saat ini di masyarakat secara nyata dengan disertai berbagai langkah solusi strategis yang langsung dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Melalui Rakornis di Bidang Perhubungan Darat ini diharapkan dapat dirumuskan berbagai langkah kebijakan dan rencana aksi secara terkoordinasi dan terintegrasi di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang selanjutnya dapat dilaksanakan dengan konsisten dilandasi atas kebersamaan dan komitmen yang kuat, sehingga kinerja di bidang perhubungan darat dapat terwujud dengan lebih baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

B. ISU-ISU STRATEGIS

Adapun isu-isu strategis yang perlu dibahas dalam Rakornis antara lain :

1. Implementasi UU No. 22/2009 tentang LLAJ dan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang terkait dengan bidang LLASDP serta beberapa peraturan pelaksanaannya serta kesiapan pemerintah pusat maupun daerah terhadap tindak lanjut peraturan perundang – undangan di bidang perhubungan darat dengan berbagai langkah kebijakan dan rencana aksi secara terkoordinasi dan terintegrasi.
2. Pemberdayaan potensi institusi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan perhubungan darat dan mewujudkan target pembangunan yang lebih optimal dengan salah satu indikator terwujudnya predikat penilaian WTP.
3. Peningkatan hubungan tata kerja pusat dan daerah dalam penyelenggaraan bidang perhubungan darat dengan membangun komitmen Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengoprasionalkan hasil pembangunan secara berkesinambungan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum maksud penyelenggaraan Rakornis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2013 ini adalah sebagai upaya peningkatan kinerja dari setiap unit kerja baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka tercapainya hasil pembangunan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan di bidang Perhubungan Darat.

Adapun Tujuan diselenggarakannya Rakornis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2013 adalah :

1. Perkuatan institusi dalam merespon isu strategis di bidang perhubungan darat khususnya terkait di bidang pembangunan.
2. Untuk dapat terus terpelihara koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan maupun pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
3. Pengembangan kapasitas institusi untuk peningkatan pelayanan di bidang perhubungan darat.

D. TEMA

Tema dalam Rakornis tahun 2013 ini berkaitan dengan pokok bahasan yang akan didiskusikan perihal Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi Darat, perkuatan kelembagaan penyelenggaraan Transportasi Darat, tantangan penyelenggaraan transportasi masa depan serta *issue-issue* strategis lainnya. Terkait hal tersebut tema yang dicanangkan adalah :

**“Perkuatan dan Pemberdayaan Potensi Institusi Pusat dan Daerah dalam rangka
Peningkatan Kinerja di Bidang Perhubungan Darat”**

E. PENYELENGGARAAN RAKORNIS

1. Waktu dan Tempat

Rakornis dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 4 Oktober 2013 bertempat di Shangri-La Hotel, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya, Jawa Timur Telp. (6231) 6003 8888 Fax .(6231) 566 1570.

2. Fasilitas yang disediakan :

1. Fasilitas ruang Sidang;
2. Perlengkapan untuk peserta berupa tas berisi bahan presentasi dan alat tulis;
3. Konsumsi selama Rakornis;
4. Fasilitas Shuttle Bus untuk Hotel-Hotel di sekitar tempat penyelenggaraan kegiatan.
5. Pelayanan kesehatan ringan;

3. Fasilitas yang tidak ditanggung Panitia :

- a. Biaya penggunaan fax atau telefon;
- b. Permintaan akomodasi dan fasilitas lain dari Hotel;
- c. Biaya konsumsi dan lain-lain, diluar yang telah disediakan Panitia.
- c. Mini Bar, Permintaan Laundry.

4. Pendaftaran Peserta

Para peserta Rakornis sudah harus melapor kepada panitia :

Hari / Tanggal : Rabu, 2 Oktober 2013

Pukul : 13.00-18.00 WIB

Tempat : SHANGRI-LA HOTEL, Surabaya, Jawa Timur

Jl. Mayjen Sungkono, Surabaya, Jawa Timur

Telp. (6231) 6003 8888 Fax .(6231) 566 1570.

5. Pembicara

Pembicara yang akan mengisi acara Rakornis adalah :

- a. Menteri Perhubungan R.I
- b. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
- c. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana BAPPENAS
- d. Direktur Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan dan Diklat BPK
- e. Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK
- f. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Ditjen Hubdat
- g. Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

- (LLASDP) Ditjen Hubdat
- h. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) Ditjen Hubdat
 - i. Direktur Keselamatan Transportasi Darat (KTD) Ditjen Hubdat.

6. Peserta Rakornis

- Peserta Rakornis terdiri dari unsur-unsur:
- a. Ditjen Perhubungan Darat;
 - b. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi;
 - c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
 - d. BUMN Bidang Perhubungan Darat;
 - e. Kepala Puslitbang Perhubungan Darat;
 - f. Kepala Pusat PSDM Perhubungan Darat;
 - g. Ketua STTD;
 - h. Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
 - i. Kepala Balai LLAJSDP di lingkungan Ditjen Hubdat;
 - j. Kepala OPP di lingkungan Ditjen Hubdat;
 - k. Kepala UPT di lingkungan Ditjen Hubdat;
 - l. Kepala Balai Diklat Transportasi Darat Bali;
 - m. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang;
 - n. Unit Kerja terkait di lingkungan Kemenhub.

F. ACARA

Secara garis besar acara yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Pembukaan dan Pengarahan oleh Menteri Perhubungan.
2. Pengarahan Umum oleh Dirjen Hubdat.
3. Paparan oleh BAPPENAS, BPK dan KPK.
4. Sidang-sidang Komisi yang terdiri atas:
5. Penutupan.

Susunan Acara Rakornis Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dalam lampiran I.

G. MEKANISME SIDANG KOMISI

- a. Dalam Sidang Komisi akan dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih oleh peserta sidang komisi yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan Sidang Komisi, Ketua dan Sekretaris akan didampingi oleh Narasumber dan Fasilitator.
- b. Pembagian Komisi
 1. Komisi I : Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Narasumber Direktur LL AJ didampingi para Kasubdit di Lingkungan Direktorat LL AJ.

2. Komisi II : Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Narasumber Direktur LLASDP didampingi para Kasubdit di Lingkungan Direktorat LLASDP
 3. Komisi III : Bidang Transportasi Perkotaan
Narasumber Direktur BSTP didampingi para Kasubdit di Lingkungan Direktorat BSTP
 4. Komisi IV : Bidang Keselamatan Transportasi Darat
Narasumber Direktur KTD didampingi para Kasubdit di Lingkungan Direktorat KDT.
- c. Penyampaian Hasil Perumusan Sidang Komisi oleh Ketua Komisi atau perwakilan dari masing-masing komisi sebagai bahan rekomendasi hasil-hasil Rakornis Perhubungan Darat Tahun 2013.

H. TATA TERTIB PENYELENGGARAAN RAKORNIS

1. Panitia Pelaksana menerima pendaftaran peserta mulai pukul 13.00 WIB pada Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2013.
2. Peserta dipersilakan untuk menginap di Hotel-Hotel terdekat yang berada di sekitar tempat kegiatan Rakornis berlangsung.
3. Hadir 15 menit di ruang sidang sebelum acara dimulai.
4. Mengisi daftar hadir yang disediakan Panitia.
5. Acara Pembukaan peserta diharapkan berpakaian Batik Lengan Panjang.
6. Selama kegiatan Rakornis, Peserta wajib berpakaian Dinas Harian (PDH) dan menggunakan tanda pengenal.
7. Selama kegiatan berlangsung, peserta dilarang meninggalkan ruang Rakornis atau sidang kecuali mendapat ijin dari Panitia.
8. Menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merokok di ruang Rakornis atau ruang sidang.
9. Memberitahukan kepada Panitia apabila berhalangan hadir.
10. Menjaga ketertiban dan ketenangan selama Rakornis berlangsung.

H. JUMLAH PESERTA DAN UNDANGAN RAKORNIS TAHUN 2013

1. PESERTA

Jumlah peserta dalam penyelenggaraan Rakornis tahun 2013 direncanakan sebanyak 593 orang, yang terdiri dari:

- a. Dirjen Perhubungan Darat = 1 orang
- b. Sesditjen / Para Direktur di lingkungan
Ditjen Perhubungan Darat = 5 orang

c. Kapuslitbang Perhubungan Darat	=	1 orang
d. Kapus PSDM Perhubungan Darat	=	1 orang
e. Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Tegal	=	1 orang
f. Kepala Pusat Kajian Strategis PJP Dephub	=	1 orang
g. Kepala Dishub/LLAJ Propinsi	=	33 orang
h. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten /Kota	=	487 orang
i. Direksi BUMN (Damri, ASDP, PPD)	=	4 orang
j. Kepala Balai di lingkungan Ditjen Hubdat	=	5 orang
k. Kepala OPP di lingkungan Ditjen Hubdat	=	4 orang
l. Ketua STTD Bekasi	=	1 orang
m. Kepala UPT di lingkungan Ditjen Hubdat	=	3 orang
n. Kepala Balai Diklat Transportasi Darat,Bali	=	1 orang
o. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang	=	1 orang
p. Pemimpin Cabang PT. ASDP	=	21 orang
q. Para Pejabat Eselon III di lingkungan Ditjen Hubdat	=	23 orang

2. UNDANGAN

Peserta undangan yang diharapkan hadir dalam Rakornis Tahun 2013 ini terdiri dari Unit Kerja / Instansi di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Instansi terkait yang mempunyai relevansi langsung dalam upaya meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan transportasi darat.

Undangan terdiri dari:

a. Menteri Perhubungan	=	1 orang
b. Sekjen Kementerian Perhubungan	=	1 orang
c. Gubernur Jawa Timur	=	1 orang
d. Irjen Kementerian Perhubungan	=	1 orang
e. Dirjen Perhubungan Laut	=	1 orang
f. Dirjen Perhubungan Udara	=	1 orang
g. Dirjen Perkeretaapian	=	1 orang
h. Kabadan Litbang Kemhub	=	1 orang
i. Kabadan PSDM Perhubungan	=	1 orang
j. Walikota Surabaya	=	1 orang
k. Direksi BUMN Bidang Perhubungan Darat	=	2 orang
l. Kepala Biro Perencanaan Kemhub	=	1 orang
m. Kepala Biro Keuangan Kemhub	=	1 orang
n. Kepala Pusdatin Kemhub	=	1 orang
o. DPP Organda	=	1 orang

p. Gapasdap	=	1 orang
q. PT. Jasa Raharja	=	1 orang
r. PT. Jasa Raharja Putera	=	1 orang
s. Wartawan	=	10 orang

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran I

SUSUNAN ACARA
RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
TANGGAL 2 s.d 4 OKTOBER 2013
SHANGRI-LA HOTEL, SURABAYA

NO	HARI / TGL	JAM	KEGIATAN / ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WIB			
1.	Rabu 2 Okt'13	13.00-17.00	Registrasi Peserta	The Grand Ballroom	Bidang Akomodasi
		19.00 – selesai	1. Sambutan Selamat Datang oleh Dirjen Perhubungan Darat. 2. Ramah Tamah dan Makan Malam (Fullband)	Ruang : The Grand Ballroom <i>Pakaian Batik Lengan Panjang</i>	Bidang Acara, Bidang Humas, MC, Fullband
2.	Kamis 3 Okt'13	08.00 – 10.45	Pembukaan Rakornis dan Penyerahan Penghargaan WTN 1. Tarian Selamat Datang (Lenggang Surabaya) 2. Lagu Indonesia Raya 3. Hymne Perhubungan 4. Laporan Ketua Panitia 5. Sambutan Selamat Datang oleh Gubernur Jatim 6. Penyerahan Penghargaan WTN dan Bus . 7. Sambutan Perwakilan Penerima Penghargaan WTN 8. Pengarahan dan Pembukaan Rakornis oleh Menteri Perhubungan. 9. Pembacaan Doa	Ruang : The Grand Ballroom <i>Pakaian Dinas Harian</i>	Bidang Acara, Bidang Humas, MC

NO	HARI / TGL	JAM	KEGIATAN / ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		10.45 – 11.00	Rehat (Coffe Break)	Ruang : di Area Grand Ballroom	Bidang Konsumsi
		11.00 – 13.00	Paparan Oleh: Bappenas, BPK dan KPK Moderator : Sesijsen Kementerian Perhubungan	Ruang : The Grand Ballroom <i>Paparan Pleno @20 Menit</i> <i>Tanya Jawab 1 Jam</i>	Bidang Materi
		13.00- 13.15	Pembagian Komisi	Ruang : The Grand Ballroom <i>Daftar Pembagian Komisi dapat dilihat di pengumuman area Grand Ballroom dan Buku Rakornis</i>	Bidang Acara, Bidang Materi
		13.15 – 14.00	ISOMA, Makan siang	Ruang : di Area Grand Ballroom	Bidang Konsumsi
		14.00 – 16.30	SIDANG KOMISI 1.Komisi Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2.Komisi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 3.Komisi Bidang Transportasi Perkotaan 4.Komisi Bidang Keselamatan Transportasi Darat	Ruang : The Grand Ballroom Ruang : The Grand Ballroom Ruang : The Grand Ballroom Ruang : Kalimantan Ballroom	Bidang Acara, Bidang Sekretariat, Bidang Materi,
		16.30-17.00	Coffe Break	Bidang Materi merumuskan hasil sidang komisi.	Bidang Konsumsi Bidang Materi

NO	HARI / TGL	JAM	KEGIATAN / ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		17.00 – 18.00	Penutup 1. Pembacaan Perumusan Hasil Sidang Rakornis Bidang Perhubungan Darat oleh Sesditjen Hubdat di lanjutkan penyerahan hasil perumusan kepada Dirjen Perhubungan Darat. 2. Laporan Ketua Panitia 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Penutupan oleh Dirjen Perhubungan Darat 5. Pembacaan Do'a	Ruang : The Grand Ballroom	Bidang Acara, Bidang Sekretariat, Bidang Materi,
		18.00 - selesai	Istirahat, Sholat dan Makan Malam (Musik Organ Tunggal)	Ruang : The Grand Ballroom	Bidang Konsumsi

NO	HARI / TGL	JAM	KEGIATAN / ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WIB			
3.	Jum'at, 4 Okt'13	08.00-10.00	Pembagian Hasil Proceeding Rakornis	<i>Pakaian Dinas Harian</i>	Bidang Sekretariat
		11.00-12.00	Check Out		Bidang Akomodasi, Perjalanan

**ORGANISASI PERSIDANGAN
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN 2013**

I. KOMISI I BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Pimpinan Sidang : (akan dipilih oleh peserta)

B. Sekertaris : (akan dipilih oleh peserta)

C. Nara Sumber /Fasilitator :

1. Ir. Sugihardjo, MSi (Direktorat LLAJ)
2. Ir. Toto Noerwitjaksono, M.Sc. (Direktorat LLAJ)
3. Pandu Yunianto, ATD, M Eng. Sc (Direktorat LLAJ)
4. I Made Suartika, ATD, M.Eng.Sc (Direktorat LLAJ)
5. Ahmad ZB , ATD, SE, MM (Direktorat LLAJ)
6. Drs. Subroto (Direktorat LLAJ)
7. Suyadi, SH (Setditjen Hubdat)

D. Notulen :

1. Yusuf Nugroho, ST,MT (Direktorat LLAJ)
2. Suhendro Wagiono ST. (Direktorat LLAJ)
3. Desi Waluyanti, S.SiT.,M.Sc (Direktorat LLAJ)

E. Perumus :

1. Ir. Toto Noerwitjaksono, M.Sc. (Direktorat LLAJ/Ketua Tim)
2. Pandu Yunianto, ATD, M Eng. Sc (Direktorat LLAJ)
3. I Made Suartika, ATD, M.Eng.Sc (Direktorat LLAJ)
4. Ahmad ZB , ATD, SE, MM (Direktorat LLAJ)
5. Drs. Subroto (Direktorat LLAJ)
6. Suyadi, SH (Setditjen Hubdat)
7. Yusuf Nugroho, ST,MT (Direktorat LLAJ)
8. Suhendro Wagiono ST. (Direktorat LLAJ)
9. Desi Waluyanti, S.SiT.,M.Sc (Direktorat LLAJ)
10. Perwakilan Peserta

F. Peserta :

1. Kadishub Prov. Aceh
2. Kadishub Prov. Bengkulu
3. Kadishub Prov. D.I Yogyakarta
4. Kadishub Prov. Jambi
5. Kadishub Prov. Jawa Tengah
6. Kadishub Prov. Kalimantan Barat
7. Kadishub Prov. Nusa Tenggara Barat
8. Kadishub Prov. Papua
9. Kadishub Prov. Sulawesi Utara
10. Kadishub Kota Balikpapan
11. Kadishub Kota Bandar Lampung
12. Kadishub Kota Bandung
13. Kadishub Kota Banjar Baru
14. Kadishub Kota Batam
15. Kadishub Kota Bau-bau
16. Kadishub Kota Beka

17. Kadishub Kota Cirebon
 18. Kadishub Kota Jayapura
 19. Kadishub Kota Makassar
 20. Kadishub Kota Medan
 21. Kadishub Kota Padang
 22. Kadishub Kota Palembang
 23. Kadishub Kota Pontianak
 24. Kadishub Kota Salatiga
 25. Kadishub Kota Semarang
 26. Kadishub Kota Tangerang Selatan
 27. Kadishub Kota Tarakan
 28. Kadishub Kota Tasikmalaya
 29. Kadishub Kota Tegal
 30. Kadishub Kota Yogyakarta
 31. Kadishub Kab. Asmat
 32. Kadishub Kab. Bandung
 33. Kadishub Kab. Banggai
 34. Kadishub Kab. Bangka Selatan
 35. Kadishub Kab. Bangkalan
 36. Kadishub Kab. Banjar
 37. Kadishub Kab. Belitung Timur
 38. Kadishub Kab. Bengkayang
 39. Kadishub Kab. Berau
 40. Kadishub Kab. Biak Numfor
 41. Kadishub Kab. Brebes
 42. Kadishub Kab. Bulukumba
 43. Kadishub Kab. Bulungan
 44. Kadishub Kab. Buru
 45. Kadishub Kab. Buton
 46. Kadishub Kab. Ciamis
 47. Kadishub Kab. Garut
 48. Kadishub Kab. Gunung Kidul
 49. Kadishub Kab. Gunung Mas
 50. Kadishub Kab. Halmahera Selatan
 51. Kadishub Kab. Halmahera Tengah
 52. Kadishub Kab. Halmahera Timur
 53. Kadishub Kab. Jembrana
 54. Kadishub Kab. Jeneponto
 55. Kadishub Kab. Kaimana
 56. Kadishub Kab. Kapuas
 57. Kadishub Kab. Karawang
 58. Kadishub Kab. Katingan
 59. Kadishub Kab. Keerom
 60. Kadishub Kab. Ketapang
 61. Kadishub Kab. Kolaka Utara
 62. Kadishub Kab. Kota Baru
 63. Kadishub Kab. Kotawaringin Timur
 64. Kadishub Kab. Kudus
 65. Kadishub Kab. Kutai Timur
 66. Kadishub Kab. Labuhanbatu Selatan
 67. Kadishub Kab. Labuhanbatu Utara
 68. Kadishub Kab. Lamandau
 69. Kadishub Kab. Langkat
 70. Kadishub Kab. Lanny Jaya
 71. Kadishub Kab. Lembata
 72. Kadishub Kab. Lombok Timur
 73. Kadishub Kab. Lombok Utara
 74. Kadishub Kab. Luwu Timur
 75. Kadishub Kab. Luwu Utara
 76. Kadishub Kab. Malinau
 77. Kadishub Kab. Mamberamo Raya
 78. Kadishub Kab. Mamberamo Tengah
 79. Kadishub Kab. Maluku Barat Daya
 80. Kadishub Kab. Mamuju
 81. Kadishub Kab. Manggarai Barat
 82. Kadishub Kab. Manggarai Timur
 83. Kadishub Kab. Manokwari
 84. Kadishub Kab. Mappi
 85. Kadishub Kab. Melawi
 86. Kadishub Kab. Mesuji
 87. Kadishub Kab. Murung Raya
 88. Kadishub Kab. Musi Banyuasin
 89. Kadishub Kab. Nabire
 90. Kadishub Kab. Ngada
 91. Kadishub Kab. Nunukan
 92. Kadishub Kab. Ogan Ilir
 93. Kadishub Kab. Ogan Komering Ilir
 94. Kadishub Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
 95. Kadishub Kab. Ogan Komering Ulu Timur
 96. Kadishub Kab. Pacitan
 97. Kadishub Kab. Painai
 98. Kadishub Kab. Pasir
 99. Kadishub Kab. Pati
 100. Kadishub Kab. Penajam Paser Utara
 101. Kadishub Kab. Pontianak
 102. Kadishub Kab. Pulau Pisau
 103. Kadishub Kab. Purwakarta
 104. Kadishub Kab. Rote Ndao
 105. Kadishub Kab. Sambas
 106. Kadishub Kab. Sanggau
 107. Kadishub Kab. Sarmi
 108. Kadishub Kab. Sarolangun
 109. Kadishub Kab. Sekadau
 110. Kadishub Kab. Semarang
 111. Kadishub Kab. Seram Bagian Barat
 112. Kadishub Kab. Seruyan
 113. Kadishub Kab. Sidenreng Rappang
 114. Kadishub Kab. Sigi
 115. Kadishub Kab. Sijunjung
 116. Kadishub Kab. Sikka
 117. Kadishub Kab. Sinjai
 118. Kadishub Kab. Sintang
 119. Kadishub Kab. Sorong
 120. Kadishub Kab. Sorong Selatan
 121. Kadishub Kab. Subang
 122. Kadishub Kab. Sukamara
 123. Kadishub Kab. Sumbawa
 124. Kadishub Kab. Sumba Barat
 125. Kadishub Kab. Sumba Barat Daya
 126. Kadishub Kab. Sumba Tengah
 127. Kadishub Kab. Sumba Timur
 128. Kadishub Kab. Sumbawa Barat

129. Kadishub Kab. Sumbawa Timur
130. Kadishub Kab. Takalar
131. Kadishub Kab. Tanah Bumbu
132. Kadishub Kab. Tangerang
133. Kadishub Kab. Tanjung Jabung
134. Kadishub Kab. Tapin
135. Kadishub Kab. Tebo
136. Kadishub Kab. Telek Wandoma
137. Kadishub Kab. Trenggalek
138. Kadishub Kab. Wajo
139. Kadishub Kab. Way Kanan
140. Kadishub Kab. Yahukimo
141. Kadishub Kab. Yapen Waroppen
142. Kepala Balai Diklat Transportasi
Darat Bali
143. Kepala Balai PLJSKB Bekasi
144. Kepala Balai LLAJSDP Palu

II. KOMISI II BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

A. Pimpinan Sidang : (akan dipilih oleh peserta)

B. Sekertaris : (akan dipilih oleh peserta)

C. Nara Sumber /Fasilitator :

1. Ir. Sudirman Lambali, S.Sos, M.Si (Direktorat LLASDP)
2. Ir. Johnny Siagian,MM (Direktorat LLASDP)
3. Ir. Hardi Sukarlianto (Direktorat LLASDP)
4. Drs. Wijianto,MSi (Direktorat LLASDP)
5. Ir. Rusli Rahim, MSi (Direktorat LLASDP)
6. Ir. Cucu Mulyana, DESS (Direktorat LLASDP)

D. Notulen :

1. Arif Muljanto,ST., MT (Direktorat LLASDP)
2. Sri Hardianto, ST (Direktorat LLASDP)
3. Elrina, AMD, LLASD, ST (Direktorat LLASDP)

E. Perumus :

1. Ir. Johnny Siagian,MM (Direktorat ASDP/Ketua Tim)
2. Ir. Hardi Sukarlianto (Direktorat LLASDP)
3. Drs. Wijianto,MSi (Direktorat LLASDP)
4. Ir. Rusli Rahim, MSi (Direktorat LLASDP)
5. Ir. Cucu Mulyana, DESS (Direktorat LLASDP)
6. Arif Muljanto,ST., MT (Direktorat LLASDP)
7. Sri Hardianto, ST (Direktorat LLASDP)
8. Elrina, AMD, LLASD, ST (Direktorat LLASDP)
9. Perwakilan Peserta

F. Anggota :

1. Kadishub Prov. Gorontalo
2. Kadishub Prov. Kepulauan Riau
3. Kadishub Prov. Lampung
4. Kadishub Prov. Kalimantan Selatan
5. Kadishub Prov. Kalimantan Timur
6. Kadishub Prov. Kalimantan Utara
7. Kadishub Prov. Maluku Utara
8. Kadishub Prov. Sulawesi Barat
9. Kadishub Prov. Sulawesi Tenggara
10. Kadishub Prov. Sumatera Selatan
11. Kadishub Kota Banjarmasin
12. Kadishub Kota Bengkulu
13. Kadishub Kota Bima
14. Kadishub Kota Bitung
15. Kadishub Kota Cilegon
16. Kadishub Kota Dumai
17. Kadishub Kota Gorontalo
18. Kadishub Kota Jambi
19. Kadishub Kota Kendari
20. Kadishub Kota Kupang
21. Kadishub Kota Palu
22. Kadishub Kota Pekalongan
23. Kadishub Kota Pekanbaru
24. Kadishub Kota Pematang Siantar
25. Kadishub Kota Singkawang
26. Kadishub Kota Tanjung Pinang
27. Kadishub Kota Ternate
28. Kadishub Kota Samarinda

- | | |
|--|---|
| 29. Kadishub Kab. Alor | 86. Kadishub Kab. Raja Ampat |
| 30. Kadishub Kab. Banggai Kepulauan | 87. Kadishub Kab. Rokan Hilir |
| 31. Kadishub Kab. Banyuwangi | 88. Kadishub Kab. Sangihe Talaud |
| 32. Kadishub Kab. Barito Selatan | 89. Kadishub Kab. Siak |
| 33. Kadishub Kab. Barito Utara | 90. Kadishub Kab. Simeuleu |
| 34. Kadishub Kab. Barru | 91. Kadishub Kab. Sitaru |
| 35. Kadishub Kab. Batang Hari | 92. Kadishub Kab. Solok |
| 36. Kadishub Kab. Belu | 93. Kadishub Kab. Sumenep |
| 37. Kadishub Kab. Bengkalis | 94. Kadishub Kab. Tanggamus |
| 38. Kadishub Kab. Bone | 95. Kadishub Kab. Teluk Bintuni |
| 39. Kadishub Kab. Dogiyai | 96. Kadishub Kab. Timor Tengah Selatan |
| 40. Kadishub Kab. Empat Lawang | 97. Kadishub Kab. Timor Tengah Utara |
| 41. Kadishub Kab. Ende | 98. Kadishub Kab. Toba Samosir |
| 42. Kadishub Kab. Fak-fak | 99. Kadishub Kab. Tulang Bawang |
| 43. Kadishub Kab. Flores Timur | 100. Kadishub Kab. Wakatobi |
| 44. Kadishub Kab. Gorontalo Utara | 101. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang |
| 45. Kadishub Kab. Hulu Sungai Selatan | 102. Kepala Balai LLAJSDP Palangkaraya |
| 46. Kadishub Kab. Hulu Sungai Tengah | 103. Kepala OPP Gilimanuk |
| 47. Kadishub Kab. Hulu Sungai Utara | 104. Kepala OPP Merak |
| 48. Kadishub Kab. Indragiri Hilir | 105. Kepala OPP Pagimana |
| 49. Kadishub Kab. Indragiri Hulu | 106. Kepala OPP Lembar |
| 50. Kadishub Kab. Jayawijaya | 107. Kepala Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi |
| 51. Kadishub Kab. Jepara | 108. Kepala Pelabuhan Penyeberangan Palembang |
| 52. Kadishub Kab. Kampar | 109. Kepala Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo |
| 53. Kadishub Kab. Kapuas Hulu | 110. Kepala Pelabuhan Penyeberangan Kariangu |
| 54. Kadishub Kab. Karimun | 111. Direksi PT. ASDP |
| 55. Kadishub Kab. Kaur | 112. Kepala PT. ASDP Cab. Balikpapan |
| 56. Kadishub Kab. Kayong Utara | 113. Kepala PT. ASDP Cab. Bajoe |
| 57. Kadishub Kab. Kepulauan Aru | 114. Kepala PT. ASDP Cab. Kupang |
| 58. Kadishub Kab. Kepulauan Mentawai | 115. Kepala PT. ASDP Cab. Palembang |
| 59. Kadishub Kab. Kepulauan Sangihe | 116. Kepala PT. ASDP Cab. Luwuk |
| 60. Kadishub Kab. Kepulauan Sula | 117. Kepala PT. ASDP Cab. Merak |
| 61. Kadishub Kab. Kepulauan Talaud | 118. Kepala PT. ASDP Cab. Surabaya |
| 62. Kadishub Kab. Kepulauan Anambas | 119. Kepala PT. ASDP Cab. Bakauheni |
| 63. Kadishub Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 120. Kepala PT. ASDP Cab. Ketapang |
| 64. Kadishub Kab. Kepulauan Yapen | 121. Kepala PT. ASDP Cab. Lembar |
| 65. Kadishub Kab. Kolaka | |
| 66. Kadishub Kab. Konawe Utara | |
| 67. Kadishub Kab. Kuantan Singgingi | |
| 68. Kadishub Kab. Kubu Raya | |
| 69. Kadishub Kab. Kupang | |
| 70. Kadishub Kab. Kutai Kertanegara | |
| 71. Kadishub Kab. Lamongan | |
| 72. Kadishub Kab. Lampung Selatan | |
| 73. Kadishub Kab. Lingga | |
| 74. Kadishub Kab. Lombok Barat | |
| 75. Kadishub Kab. Luwu | |
| 76. Kadishub Kab. Malang | |
| 77. Kadishub Kab. Maluku Tengah | |
| 78. Kadishub Kab. Maluku Tenggara | |
| 79. Kadishub Kab. Maluku Tenggara Barat | |
| 80. Kadishub Kab. Mamuju Utara | |
| 81. Kadishub Kab. Manggarai | |
| 82. Kadishub Kab. Merauke | |
| 83. Kadishub Kab. Muaro Jambi | |
| 84. Kadishub Kab. Natuna | |
| 85. Kadishub Kab. Pangkajene Kepulauan | |

III. KOMISI III BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN

A. Pimpinan Sidang : (akan dipilih oleh peserta)

B. Sekertaris : (akan dipilih oleh peserta)

C. Nara Sumber/Fasilitator :

1. DR. Ir. Djoko Sasono, MSc. (Direktorat BSTP)
2. Ir.Rasman Ginting Munte, MStr (Direktorat BSTP)
3. Ir. Djamal Subastian,MSc (Direktorat BSTP)
4. Ir. Karlo Manik, MNQCE (Direktorat BSTP)
5. Drs. Firdaus Rasyad, MM (Direktorat BSTP)
6. Ir. Jujun Endah Wahjuningrum, MT (Direktorat BSTP)

D. Notulen :

1. Harno Trimadi, ST, MT (Direktorat BSTP)
2. Iman Sukandar, S.SiT, MT (Direktorat BSTP)
3. Andi Putra Jaya, MSc. (Direktorat BSTP)
4. Hikmat Hidayat Putu,ST (Direktorat BSTP)

E. Perumus :

1. Ir. Jujun Endah Wahjuningrum, MT (Direktorat BSTP/Ketua Tim)
2. Ir.Rasman Ginting Munte, MStr (Direktorat BSTP)
3. Ir. Djamal Subastian,MSc (Direktorat BSTP)
4. Ir. Karlo Manik, MNQCE (Direktorat BSTP)
5. Drs. Firdaus Rasyad, MM (Direktorat BSTP)
6. Harno Trimadi, ST, MT (Direktorat BSTP)
7. Iman Sukandar, S.SiT, MT (Direktorat BSTP)
8. Andi Putra Jaya, MSc. (Direktorat BSTP)
9. Hikmat Hidayat Putu,ST (Direktorat BSTP)
10. Perwakilan Peserta

F. Anggota :

1. Kadishub Prov. Bali
2. Kadishub Prov. DKI Jakarta
3. Kadishub Prov. Jawa Barat
4. Kadishub Prov. Sulawesi Selatan
5. Kadishub Prov. Sumatera Utara
6. Kadishub Kota Banjar
7. Kadishub Kota Batu
8. Kadishub Kota Binjai
9. Kadishub Kota Bogor
10. Kadishub Kota Bontang
11. Kadishub Kota Bukit Tinggi
12. Kadishub Kota Cimahi
13. Kadishub Kota Langsa
14. Kadishub Kota Lubuklinggau
15. Kadishub Kota Lhokseumawe
16. Kadishub Kota Magelang
17. Kadishub Kota Mataram
18. Kadishub Kota mobagu
19. Kadishub Kota Mojokerto
20. Kadishub Kota Pagaralam
21. Kadishub Kota Palangka Raya
22. Kadishub Kota Palopo
23. Kadishub Kota Pare-pare
24. Kadishub Kota Pariaman
25. Kadishub Kota Pasuruan
26. Kadishub Kota Payakumbuh

27. Kadishub Kota Prabumulih
28. Kadishub Kota Probolinggo
29. Kadishub Kota Sawah Lunto
30. Kadishub Kota Sibolga
31. Kadishub Kota Solok
32. Kadishub Kota Subulussalam
33. Kadishub Kota Sukabumi
34. Kadishub Kota Sungai Penuh
35. Kadishub Kota Surabaya
36. Kadishub Kota Surakarta
37. Kadishub Kota Tangerang
38. Kadishub Kota Tanjung Balai
39. Kadishub Kota Tebing Tinggi
40. Kadishub Kota Tidore Kepulauan
41. Kadishub Kota Tomohon
42. Kadishub Kota Tual
43. Kadishub Kab. Aceh Barat
44. Kadishub Kab. Aceh Barat Daya
45. Kadishub Kab. Aceh Besar
46. Kadishub Kab. Aceh Jaya
47. Kadishub Kab. Aceh Selatan
48. Kadishub Kab. Aceh Singkil
49. Kadishub Kab. Aceh Tamiang
50. Kadishub Kab. Aceh Tengah
51. Kadishub Kab. Aceh Timur
52. Kadishub Kab. Agam
53. Kadishub Kab. Asahan
54. Kadishub Kab. Badung
55. Kadishub Kab. Bangka
56. Kadishub Kab. Bangka Barat
57. Kadishub Kab. Bangka Tengah
58. Kadishub Kab. Bangli
59. Kadishub Kab. BanjarNEGARA
60. Kadishub Kab. Banyuasin
61. Kadishub Kab. Banyumas
62. Kadishub Kab. Bekasi
63. Kadishub Kab. Bireuen
64. Kadishub Kab. Bogor
65. Kadishub Kab. Bojonegoro
66. Kadishub Kab. Bondowoso
67. Kadishub Kab. Bungo
68. Kadishub Kab. Cianjur
69. Kadishub Kab. Dairi
70. Kadishub Kab. Deli Serdang
71. Kadishub Kab. Demak
72. Kadishub Kab. Dharmasraya
73. Kadishub Kab. Gayo Lues
74. Kadishub Kab. Gianyar
75. Kadishub Kab. Gresik
76. Kadishub Kab. Grobongan
77. Kadishub Kab. Humbang Hasudutan
78. Kadishub Kab. Indramayu
79. Kadishub Kab. Jombang
80. Kadishub Kab. Karo
81. Kadishub Kab. Kediri
82. Kadishub Kab. Kerinci
83. Kadishub Kab. Kuningan
84. Kadishub Kab. Lebak
85. Kadishub Kab. Lima Puluh Kota
86. Kadishub Kab. Lumajang
87. Kadishub Kab. Madiun
88. Kadishub Kab. Magelang
89. Kadishub Kab. Magetan
90. Kadishub Kab. Majalengka
91. Kadishub Kab. Mandailing Natal
92. Kadishub Kab. Maros
93. Kadishub Kab. Merangin
94. Kadishub Kab. Minahasa Utara
95. Kadishub Kab. Mojokerto
96. Kadishub Kab. Muara Enim
97. Kadishub Kab. Muara Jambi
98. Kadishub Kab. Nagan Raya
99. Kadishub Kab. Nias
100. Kadishub Kab. Nias Selatan
101. Kadishub Kab. OKU Timur
102. Kadishub Kab. Padang Pariaman
103. Kadishub Kab. Pakpak Barat
104. Kadishub Kab. Pandeglang
105. Kadishub Kab. Pasaman
106. Kadishub Kab. Pasaman Barat
107. Kadishub Kab. Pasuruan
108. Kadishub Kab. Pelalawan
109. Kadishub Kab. Pemalang
110. Kadishub Kab. Pesisir Selatan
111. Kadishub Kab. Pidie
112. Kadishub Kab. Pidie Jaya
113. Kadishub Kab. Purbalingga
114. Kadishub Kab. Rajeng Lembong
115. Kadishub Kab. Rembang
116. Kadishub Kab. Samosir
117. Kadishub Kab. Sawah Lunto Sijujung
118. Kadishub Kab. Serang
119. Kadishub Kab. Serdang Bedagai
120. Kadishub Kab. Sidoarjo
121. Kadishub Kab. Simalungun
122. Kadishub Kab. Situbondo
123. Kadishub Kab. Solok Selatan
124. Kadishub Kab. Soppeng
125. Kadishub Kab. Sorolangun
126. Kadishub Kab. Sukoharjo
127. Kadishub Kab. Tabalong
128. Kadishub Kab. Tabanan
129. Kadishub Kab. Tanah Datar
130. Kadishub Kab. Tanjung Jabung Barat
131. Kadishub Kab. Tanjung Jabung Timur
132. Kadishub Kab. Tapanuli Selatan
133. Kadishub Kab. Tegal
134. Kadishub Kab. Temanggung
135. Kadishub Kab. Tuban
136. Kadishub Kab. Tulung Agung
137. Kadishub Kab. Wonosobo
138. Kepala Balai LLAJSDP Jambi
139. Direksi Perum Damri
140. Direksi Perum PPD

IV. KOMISI IV BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT 2013

A. Pimpinan Sidang : (akan dipilih oleh peserta)

B. Sekertaris : (akan dipilih oleh peserta)

C. Nara Sumber/Fasilitator :

1. Ir. Hotma P. Simanjuntak, MStr (Direktorat KTD)
2. DR. Gede Pasek Suardika, MSc (Direktorat KTD)
3. Eddy Gunawan, ATD, M.Eng.SC (Direktorat KTD)
4. Ir. Tri Yuli Andaru. P, GRAD DIPL, MSi (Direktorat KTD)

D. Notulen :

1. Ardono, ATD, MT (Direktorat KTD)
2. Taufiq Hidayat, SE (Direktorat KTD)
3. Ririn Scorviyanti, S.Pd (Direktorat KTD)

E. Perumus :

1. DR. Gede Pasek Suardika, MSc (Direktorat KTD/Ketua Tim)
2. Eddy Gunawan, ATD, M.Eng.SC (Direktorat KTD)
3. Ir. Tri Yuli Andaru. P, GRAD DIPL, MSi(Direktorat KTD)
4. Ardono, ATD, MT (Direktorat KTD)
5. Taufiq Hidayat, SE (Direktorat KTD)
6. Ririn Scorviyanti, S.Pd (Direktorat KTD)
7. Perwakilan Peserta

F. Anggota :

1. Kadishub Prov. Bangka Belitung
2. Kadishub Prov. Banten
3. Kadishub Prov. Jawa Timur
4. Kadishub Prov. Kalimantan Tengah
5. Kadishub Prov. Maluku
6. Kadishub Prov. NTT
7. Kadishub Prov. Papua Barat
8. Kadishub Prov. Riau
9. Kadishub Prov. Sulawesi Tengah
10. Kadishub Prov. Sumatera Barat
11. Kadishub Kota Ambon
12. Kadishub Kota Banda Aceh
13. Kadishub Kota Bandung
14. Kadishub Kota Blitar
15. Kadishub Kota Denpasar
16. Kadishub Kota Depok
17. Kadishub Kota Kediri
18. Kadishub Kota Madiun
19. Kadishub Kota Malang
20. Kadishub Kota Manado
21. Kadishub Kota Metro
22. Kadishub Kota Padang Panjang
23. Kadishub Kota Padang Sidempuan
24. Kadishub Kota Pangkal Pinang
25. Kadishub Kota Sabang
26. Kadishub Kota Sorong
27. Kadishub Kota Tidore
28. Kadishub Kab. Aceh Tenggara
29. Kadishub Kab. Aceh Utara
30. Kadishub Kab. Balangan
31. Kadishub Kab. Bandung
32. Kadishub Kab. Bantoeng
33. Kadishub Kab. Bantul

- | | | | |
|-----|----------------------------------|------|--|
| 34. | Kadishub Kab. Barito Kuala | 93. | Kadishub Kab. Nagekeo |
| 35. | Kadishub Kab. Barito Timur | 94. | Kadishub Kab. Nduga |
| 36. | Kadishub Kab. Batang | 95. | Kadishub Kab. Nganjuk |
| 37. | Kadishub Kab. Belitung | 96. | Kadishub Kab. Ngawi |
| 38. | Kadishub Kab. Bener Meriah | 97. | Kadishub Kab. Ogan Komering Ulu |
| 39. | Kadishub Kab. Bengkulu Selatan | 98. | Kadishub Kab. Pahuwato |
| 40. | Kadishub Kab. Bengkulu Utara | 99. | Kadishub Kab. Pamekasan |
| 41. | Kadishub Kab. Bima | 100. | Kadishub Kab. Padang Lawas |
| 42. | Kadishub Kab. Blitar | 101. | Kadishub Kab. Padang Lawas Utara |
| 43. | Kadishub Kab. Blora | 102. | Kadishub Kab. Paniai |
| 44. | Kadishub Kab. Boalemo | 103. | Kadishub Kab. Parigi Mountong |
| 45. | Kadishub Kab. Bombana | 104. | Kadishub Kab. Pekalongan |
| 46. | Kadishub Kab. Bone Bolango | 105. | Kadishub Kab. Pegunungan Bintang |
| 47. | Kadishub Kab. Boven Digoel | 106. | Kadishub Kab. Pesawaran |
| 48. | Kadishub Kab. Boyolali | 107. | Kadishub Kab. Pohuwato |
| 49. | Kadishub Kab. Buleleng | 108. | Kadishub Kab. Pring Sewu |
| 50. | Kadishub Kab. Buol | 109. | Kadishub Kab. Pinrang |
| 51. | Kadishub Kab. Cilacap | 110. | Kadishub Kab. Polewali Mandar |
| 52. | Kadishub Kab. Cirebon | 111. | Kadishub Kab. Ponorogo |
| 53. | Kadishub Kab. Dompu | 112. | Kadishub Kab. Poso |
| 54. | Kadishub Kab. Donggala | 113. | Kadishub Kab. Probolinggo |
| 55. | Kadishub Kab. Enrekang | 114. | Kadishub Kab. Puncak Jaya |
| 56. | Kadishub Kab. Gorontalo | 115. | Kadishub Kab. Purworejo |
| 57. | Kadishub Kab. Gowa | 116. | Kadishub Kab. Rokan Hulu |
| 58. | Kadishub Kab. Halmahera Barat | 117. | Kadishub Kab. Sampang |
| 59. | Kadishub Kab. Halmahera Utara | 118. | Kadishub Kab. Selayar |
| 60. | Kadishub Kab. Jayapura | 119. | Kadishub Kab. Seluma |
| 61. | Kadishub Kab. Jember | 120. | Kadishub Kab. Seram Bagian Timur |
| 62. | Kadishub Kab. Karanganyar | 121. | Kadishub Kab. Sleman |
| 63. | Kadishub Kab. Karangasem | 122. | Kadishub Kab. Sragen |
| 64. | Kadishub Kab. Kebumen | 123. | Kadishub Kab. Sukabumi |
| 65. | Kadishub Kab. Kendal | 124. | Kadishub Kab. Sumedang |
| 66. | Kadishub Kab. Kepahiang | 125. | Kadishub Kab. Supiori |
| 67. | Kadishub Kab. Klaten | 126. | Kadishub Kab. Tana Toraja |
| 68. | Kadishub Kab. Klungkung | 127. | Kadishub Kab. Tanah Laut |
| 69. | Kadishub Kab. Konawe | 128. | Kadishub Kab. Tapanuli Tengah |
| 70. | Kadishub Kab. Konawe Selatan | 129. | Kadishub Kab. Tapanuli Utara |
| 71. | Kadishub Kab. Kotawaringin Barat | 130. | Kadishub Kab. Tasikmalaya |
| 72. | Kadishub Kab. Kulon Progo | 131. | Kadishub Kab. Tengerang |
| 73. | Kadishub Kab. Kutai Barat | 132. | Kadishub Kab. Tojo Una-una |
| 74. | Kadishub Kab. Labuhan Batu | 133. | Kadishub Kab. Toli-toli |
| 75. | Kadishub Kab. Lahat | 134. | Kasdihub Kab. Timika |
| 76. | Kadishub Kab. Lampung Barat | 135. | Kadishub Kab. Waropen |
| 77. | Kadishub Kab. Lampung Tengah | 136. | Kadishub Kab. Wonogiri |
| 78. | Kadishub Kab. Lampung Timur | 137. | Kadishub Kab. Tana Tidung |
| 79. | Kadishub Kab. Lampung Utara | 138. | Kadishub Kab. Toraja Utara |
| 80. | Kadishub Kab. Landak | 139. | Kadishub Kab. Tulang Bawang Barat |
| 81. | Kadishub Kab. Lebang | 140. | Kadishub Kab. Yalimo |
| 82. | Kadishub Kab. Lombok Tengah | 141. | Kepala Balai LLAJSDP Denpasar |
| 83. | Kadishub Kab. Majene | 142. | Ketua Politeknik Keselamatan
Transportasi Darat |
| 84. | Kadishub Kab. Mamasa | | |
| 85. | Kadishub Kab. Mimika | | |
| 86. | Kadishub Kab. Minahasa | | |
| 87. | Kadishub Kab. Minahasa Selatan | | |
| 88. | Kadishub Kab. Minahasa Tenggara | | |
| 89. | Kadishub Kab. Morowali | | |
| 90. | Kadishub Kab. Mukomuko | | |
| 91. | Kadishub Kab. Muna | | |
| 92. | Kadishub Kab. Musi Rawas | | |

V. TIM PERUMUSAN HASIL RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2013

A. Ketua : Ir. Djamal Subastian, MSc (Direktorat BSTP)

B. Sekertaris : Harno Trimadi, ST, MT (Direktorat BSTP)

C. Anggota :

1. Ir. Jonny Siagian, MM (Direktorat LLASDP)
2. Eddy Gunawan, ATD, M.Eng.SC (Direktorat KTD)
3. Ir. Toto Noerwitjaksono, M.Sc. (Direktorat LLAJ)
4. Avi Mukti Amin, S.SiT,MT (Setditjen Hubdat)
5. Arif Muljanto,ST., MT (Direktorat LLASDP)
6. Yusuf Nugroho, ST,MT (Direktorat LLAJ)
7. Ardono, ATD, MT (Direktorat KTD)
8. Iman Sukandar, S.SiT, MT (Direktorat BSTP)
9. Andi Putra Jaya, ST, MSc (Direktorat BSTP)
10. Hikmat Hidayat Putu,ST (Direktorat BSTP)
11. Desi Waluyanti, S.SiT.,M.Sc (Direktorat LLAJ)
12. Ririn Scorviyanti, S.Pd (Direktorat KTD)
13. Elrina, AMD, LLASD, ST (Direktorat LLASDP)
14. Koesbiyantoro, MSc (Setditjen Hubdat)
15. Perwakilan Peserta

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK. 4918/KP.801/DRJD/2013**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SELURUH INDONESIA
TAHUN 2013**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia Tahun 2013, diperlukan Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia Tahun 2013.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 5070);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 5093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5199);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5208);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5346);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SELURUH INDONESIA TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat seluruh Indonesia Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam **Lampiran Keputusan** ini;
- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mempunyai tugas yang terdiri atas:

1. Pengarah, mempunyai tugas :

Memberikan arahan kepada panitia pelaksana dalam penyelenggaraan pertemuan rapat koordinasi agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

2. Panitia Pelaksana/Penanggung Jawab, mempunyai tugas:

Memimpin terhadap segala kegiatan yang dilakukan setiap bidang dalam mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pertemuan rapat koordinasi sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pengarah dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah.

3. Panitia Pelaksana Bidang Materi, Persidangan dan Notulen, mempunyai tugas :

Menyiapkan kerangka acuan materi pemaparan para penceramah, materi persidangan, bertindak sebagai narasumber dalam sidang-sidang komisi, melakukan pencatatan selama berlangsungnya pembahasan dalam persidangan, dan membuat risalah serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Pelaksana.

4. Panitia Pelaksana Bidang Acara, mempunyai tugas :

Menyiapkan buku panduan dan menyusun acara pertemuan rapat, mengatur dan mengendalikan jalannya acara selama pertemuan rapat, menyiapkan acara hiburan, dan merumuskan hasil-hasil pertemuan rapat serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Pelaksana.

5. Panitia Pelaksana Bidang Transportasi dan Perjalanan, mempunyai tugas :

Menyiapkan rencana kebutuhan sarana transportasi pada saat pertemuan rapat dilaksanakan, mengorganisir penyediaan transportasi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Pelaksana.

6. Panitia Pelaksana Bidang Akomodasi dan Konsumsi, mempunyai tugas :

Mempersiapkan perlengkapan dan kelengkapan sarana dan prasarana pertemuan Rapat, mempersiapkan komisi, melakukan registrasi kehadiran peserta pertemuan rapat, dan mempersiapkan konsumsi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Pelaksana.

7. Panitia Pelaksana Bidang Sekretariat dan Proceeding, mempunyai tugas :

mempersiapkan surat-menurut dan alat tulis kantor (ATK), undangan-undangan, mengurus perijinan, pengetikan bahan dan materi hasil pertemuan, penggandaan dan pendistribusian hasil pertemuan rapat, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Pelaksana.

8. Panitia Pelaksana Bidang Humas dan Peliputan, mempunyai tugas :

Mempersiapkan bahan pengarahan pimpinan pada pembukaan dan penutupan, melakukan publikasi pelaksanaan pertemuan rapat baik melalui media cetak maupun elektronik dan memberikan informasi kepada seluruh peserta, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Pelaksana.

- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud **DIKTUM KEDUA** harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : DIPA-022.03.1.412735/2013 tanggal 5 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juli 2013

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs. SUROYO ALIMOESO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19531018 197602 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : SK. 4918/KP.801/DRJD/2013
TANGGAL : 23 Juli 2013

**PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SELURUH INDONESIA
TAHUN 2013**

I. PENGARAH

1. Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2. Anggota :
 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 2. Direktur LLAJ;
 3. Direktur LLASDP;
 4. Direktur BSTP;
 5. Direktur KTD;
 6. Kadishub Propinsi;

II. PANITIA PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB :

1. Ketua : Ir. As'ad, M.Sc
2. WK. Ketua : Sigit Irfansyah, MSc
3. Sekretaris : Sugianto, ATD, MM
4. Bendahara : Dra. Sumastini Hadi

A. PANITIA PELAKSANA BIDANG MATERI, PERSIDANGAN DAN NOTULEN

1. Ketua : Ir. Jamal Sebastian, MSc
2. Sekretaris : Iman Sukandar, S.SiT., M.T
3. Anggota :
 1. Ir. Jhonny Siagian, MM
 2. Ir. Toto Noerwitjaksono., M.Sc.
 3. Eddy Gunawan, MEng.Sc
 4. Endy Irawan, S.H.
 5. Avi Mukti Amin, S.SiT, MT
 6. Suhendro Wagiono, S.T., M.T.
 7. Yusuf Nugroho, ST, MT
 8. Sri Hardianto, ST
 9. Arif Mulyanto S.T., M.T.
 10. Harno Trimadi, S.T., M.T.
 11. Andi Putra Jaya, ST, MSc
 12. Taufik Hidayat, S.E.
 13. Ardono, S.T., M.T.
 14. Koesbiyantoro, M.Sc.
 15. Desi Waluyanti, SsiT,M.Sc
 16. Elrina, MT
 17. Hikmat Hidayat, ST
 18. Ririn Scorviyanti, S.Pd.

B. PANITIA PELAKSANA BIDANG ACARA

- | | |
|----------------|--|
| 1. Ketua | : Drs. Wijianto, M.Si. |
| 2. Wakil Ketua | : I Made Suartika, A.TD, M.Eng.Sc. |
| 3. Anggota | :
1. Tofan Muis, S.E., M.M.
2. Ariyandi Ariyus, S.SiT.. M.M.
3. Astri Widiani, Amd.LLAJ, SE
4. Ratna Syaka Aprilda A.Md.T.I
5. Farida Nuraini
6. Dishub Propinsi/Kota
7. Dishub Propinsi/Kota |

C. PANITIA PELAKSANA BIDANG AKOMODASI DAN KONSUMSI

- | | |
|----------------|--|
| 1. Ketua | : Hari Putranto, SE, MT |
| 2. Wakil Ketua | : Irly Saritini P, ST, MT |
| 3. Anggota | :
1. Hardiyanto
2. Elly Kamalia
3. Siti Ratna Hapsari, S.E.
4. Junita Valentina, M.Eng.Sc
5. Dirthasia G. Putri, ST
6. Didik Setiyawan, A.Md.LLAJ. |

D. PANITIA PELAKSANA BIDANG TRANSPORTASI DAN PERJALANAN

- | | |
|----------------|---|
| 1. Ketua | : Rudi Irawan, S.SiT., M.T. |
| 2. Wakil Ketua | : Eka Hangga Yuda, A.Md.LLAJ |
| 3. Anggota | :
1. Tarma, S.SiT
2. Dody Arifianto, A.Md.LLAJ., S.T.
3. Heri Setiawan, A.Md.LLAJ., S.E
4. Nirwan, S.H.
5. Ahmad Ardiansyah, S.H.
6. Yosep Yanuar, A.Md.LLAJ.
7. Tedi Kusno Witoro
8. Dishub Propinsi/Kota
9. Dishub Propinsi/Kota
10. Dishub Propinsi/Kota
11. Dishub Propinsi/Kota |

E. PANITIA PELAKSANA BIDANG SEKRETARIAT DAN PROCEEDING

- | | |
|----------------|--|
| 1. Ketua | : Tri Adi Bagus W., M.Sc. |
| 2. Wakil Ketua | : Ni Widaningsih, SE |
| 3. Anggota | :
1. dr. Nizzar Firdaus Trisnian Ichsan
2. Ramandani Heru S., S.Kom
3. Dewi Amalia Komalasari, A.Md.M.I
4. Thomas Brima E., A.Md.M.I.
5. Hendra Ayi Sonica, S.E.
6. Christanto
7. Darsono
8. Fachrul Rizal, A.Md.T.E.
9. Saryana A.Md.T.E.
10. Uton Supardi
11. Sutarno |

F. PANITIA PELAKSANA BIDANG HUMAS DAN PELIPUTAN

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Ketua | : | Zaenal Arifin, S.E. |
| 2. Wakil Ketua | : | Rio Susatyo, S.H. |
| 3. Anggota | : | 1. Pitra Setiawan, S.I.P., M.Sc.
2. Aulia Dharma, SH |

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs. SUROYO ALIMOESO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19531018 197602 1 001

PESERTA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
SELURUH INDONESIA TAHUN 2013

1. Kepala Dinas Perhubungan	Komunikasi, Informasi dan Telematika Prop.	Nanggroe Aceh Darussalam
2. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Barat	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
3. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Barat Daya	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
4. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Besar	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
5. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Jaya	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
6. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Selatan	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
7. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Singkil	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
8. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Tamiang	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
9. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Tengah	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
10. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Tenggara	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
11. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Timur	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
12. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Utara	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
13. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bener Meriah	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
14. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bireuen	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
15. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Gayo Lues	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
16. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Nagan Raya	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
17. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Pidie	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
18. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Pidie Jaya	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
19. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Simeulue	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
20. Kepala Dinas Perhubungan	Kota Banda Aceh	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
21. Kepala Dinas Perhubungan	Kota Langsa	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
22. Kepala Dinas Perhubungan	Kota Lhokseumawe	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
23. Kepala Dinas Perhubungan	Kota Sabang	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
24. Kepala Dinas Perhubungan	Kota Subulussalam	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
25. Kepala Dinas Perhubungan	Prop. Sumatera Utara	
26. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Asahan	Prop. Sumatera Utara
27. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Batu Bara	Prop. Sumatera Utara
28. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Dairi	Prop. Sumatera Utara
29. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Deli Serdang	Prop. Sumatera Utara
30. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Humbang Hasundutan	Prop. Sumatera Utara
31. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Karo	Prop. Sumatera Utara
32. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Labuhanbatu	Prop. Sumatera Utara
33. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Labuhanbatu Selatan	Prop. Sumatera Utara
34. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Labuhanbatu Utara	Prop. Sumatera Utara
35. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Langkat	Prop. Sumatera Utara
36. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Mandailing Natal	Prop. Sumatera Utara
37. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Nias	Prop. Sumatera Utara
38. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Nias Selatan	Prop. Sumatera Utara
39. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Padang Lawas	Prop. Sumatera Utara
40. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Padang Lawas Utara	Prop. Sumatera Utara
41. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Pakpak Bharat	Prop. Sumatera Utara
42. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Samosir	Prop. Sumatera Utara
43. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Serdang Bedagai	Prop. Sumatera Utara
44. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Simalungun	Prop. Sumatera Utara
45. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Tapanuli Selatan	Prop. Sumatera Utara
46. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Tapanuli Tengah	Prop. Sumatera Utara
47. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Tapanuli Utara	Prop. Sumatera Utara
48. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Toba Samosir	Prop. Sumatera Utara
49. Kepala Dinas Perhubungan	Kota Binjai	Prop. Sumatera Utara
50. Kepala Dinas Perhubungan	Kota Medan	Prop. Sumatera Utara
51. Kepala Dinas Perhubungan	Kota Padang Sidempuan	Prop. Sumatera Utara
52. Kepala Dinas Perhubungan	Kota Pematangsiantar	Prop. Sumatera Utara
53. Kepala Dinas Perhubungan	Kota Sibolga	Prop. Sumatera Utara
54. Kepala Dinas Perhubungan	Kota Tanjung Balai	Prop. Sumatera Utara
55. Kepala Dinas Perhubungan	Kota Tebing Tinggi	Prop. Sumatera Utara
56. Kepala Dinas Perhubungan	Prop. Bengkulu	
57. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bengkulu Selatan	Prop. Bengkulu
58. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bengkulu Tengah	Prop. Bengkulu
59. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bengkulu Utara	Prop. Bengkulu
60. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kaur	Prop. Bengkulu
61. Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kepahiang	Prop. Bengkulu

62. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lebong	Prop.	Bengkulu
63. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mukomuko	Prop.	Bengkulu
64. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Rejang Lebong	Prop.	Bengkulu
65. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Seluma	Prop.	Bengkulu
66. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bengkulu	Prop.	Bengkulu
67. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Jambi		
68. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kerinci	Prop.	Jambi
69. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Merangin	Prop.	Jambi
70. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sarolangun	Prop.	Jambi
71. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Batang Hari	Prop.	Jambi
72. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Muaro Jambi	Prop.	Jambi
73. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tanjung Jabung Barat	Prop.	Jambi
74. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tanjung Jabung Timur	Prop.	Jambi
75. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bungo	Prop.	Jambi
76. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tebo	Prop.	Jambi
77. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Jambi	Prop.	Jambi
78. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Sungai Penuh	Prop.	Jambi
79. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Riau		
80. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bengkalis	Prop.	Riau
81. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Indragiri Hilir	Prop.	Riau
82. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Indragiri Hulu	Prop.	Riau
83. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kampar	Prop.	Riau
84. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kuantan Singingi	Prop.	Riau
85. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pelalawan	Prop.	Riau
86. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Rokan Hilir	Prop.	Riau
87. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Rokan Hulu	Prop.	Riau
88. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Siak	Prop.	Riau
89. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pekanbaru	Prop.	Riau
90. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Dumai	Prop.	Riau
91. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Sumatera Barat		
92. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Agam	Prop.	Sumatera Barat
93. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Dharmasraya	Prop.	Sumatera Barat
94. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Mentawai	Prop.	Sumatera Barat
95. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lima Puluh Kota	Prop.	Sumatera Barat
96. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Padang Pariaman	Prop.	Sumatera Barat
97. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pasaman	Prop.	Sumatera Barat
98. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pasaman Barat	Prop.	Sumatera Barat
99. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pesisir Selatan	Prop.	Sumatera Barat
100. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sijunjung	Prop.	Sumatera Barat
101. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Solok	Prop.	Sumatera Barat
102. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Solok Selatan	Prop.	Sumatera Barat
103. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tanah Datar	Prop.	Sumatera Barat
104. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bukittinggi	Prop.	Sumatera Barat
105. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Padang	Prop.	Sumatera Barat
106. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Padangpanjang	Prop.	Sumatera Barat
107. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pariaman	Prop.	Sumatera Barat
108. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Payakumbuh	Prop.	Sumatera Barat
109. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Sawahlunto	Prop.	Sumatera Barat
110. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Solok	Prop.	Sumatera Barat
111. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Sumatera Selatan		
112. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ogan Komering Ulu	Prop.	Sumatera Selatan
113. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ogan Komering Ilir	Prop.	Sumatera Selatan
114. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Muara Enim	Prop.	Sumatera Selatan
115. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lahat	Prop.	Sumatera Selatan
116. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Musi Rawas	Prop.	Sumatera Selatan
117. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Musi Banyuasin	Prop.	Sumatera Selatan
118. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banyuasin	Prop.	Sumatera Selatan
119. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ogan Komering Ulu Timur	Prop.	Sumatera Selatan
120. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ogan Komering Ulu Selatan	Prop.	Sumatera Selatan
121. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ogan Ilir	Prop.	Sumatera Selatan
122. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Empat Lawang	Prop.	Sumatera Selatan
123. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Palembang	Prop.	Sumatera Selatan
124. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pagar Alam	Prop.	Sumatera Selatan
125. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Lubuklinggau	Prop.	Sumatera Selatan
126. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Prabumulih	Prop.	Sumatera Selatan
127. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Lampung		
128. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lampung Selatan	Prop.	Lampung
129. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lampung Tengah	Prop.	Lampung
130. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lampung Utara	Prop.	Lampung
131. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lampung Barat	Prop.	Lampung

132.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tulang Bawang	Prop.	Lampung
133.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tanggamus	Prop.	Lampung
134.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lampung Timur	Prop.	Lampung
135.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Way Kanan	Prop.	Lampung
136.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pesawaran	Prop.	Lampung
137.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mesuji	Prop.	Lampung
138.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pring Sewu	Prop.	Lampung
139.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tulang Bawang Barat	Prop.	Lampung
140.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bandar Lampung	Prop.	Lampung
141.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Metro	Prop.	Lampung
142.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Kepulauan Bangka Belitung		
143.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bangka	Prop.	Bangka Belitung
144.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Belitung	Prop.	Bangka Belitung
145.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bangka Selatan	Prop.	Bangka Belitung
146.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bangka Tengah	Prop.	Bangka Belitung
147.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bangka Barat	Prop.	Bangka Belitung
148.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Belitung Timur	Prop.	Bangka Belitung
149.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pangkal Pinang	Prop.	Bangka Belitung
150.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Kepulauan Riau		
151.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bintan	Prop.	Kepulauan Riau
152.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Karimun	Prop.	Kepulauan Riau
153.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Natuna	Prop.	Kepulauan Riau
154.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lingga	Prop.	Kepulauan Riau
155.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Anambas	Prop.	Kepulauan Riau
156.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tanjung Pinang	Prop.	Kepulauan Riau
157.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Batam	Prop.	Kepulauan Riau
158.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Banten		
159.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pandeglang	Prop.	Banten
160.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lebak	Prop.	Banten
161.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tangerang	Prop.	Banten
162.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Serang	Prop.	Banten
163.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tangerang	Prop.	Banten
164.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Cilegon	Prop.	Banten
165.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Serang	Prop.	Banten
166.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Jawa Barat		
167.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bogor	Prop.	Jawa Barat
168.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sukabumi	Prop.	Jawa Barat
169.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Cianjur	Prop.	Jawa Barat
170.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bandung	Prop.	Jawa Barat
171.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Garut	Prop.	Jawa Barat
172.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tasikmalaya	Prop.	Jawa Barat
173.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ciamis	Prop.	Jawa Barat
174.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kuningan	Prop.	Jawa Barat
175.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Cirebon	Prop.	Jawa Barat
176.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Majalengka	Prop.	Jawa Barat
177.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumedang	Prop.	Jawa Barat
178.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Indramayu	Prop.	Jawa Barat
179.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Subang	Prop.	Jawa Barat
180.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Purwakarta	Prop.	Jawa Barat
181.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Karawang	Prop.	Jawa Barat
182.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bekasi	Prop.	Jawa Barat
183.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bandung Barat	Prop.	Jawa Barat
184.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bogor	Prop.	Jawa Barat
185.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Sukabumi	Prop.	Jawa Barat
186.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bandung	Prop.	Jawa Barat
187.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Cirebon	Prop.	Jawa Barat
188.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bekasi	Prop.	Jawa Barat
189.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Depok	Prop.	Jawa Barat
190.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Cimahi	Prop.	Jawa Barat
191.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tasikmalaya	Prop.	Jawa Barat
192.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Banjar	Prop.	Jawa Barat
193.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	D.K.I. Jakarta		
194.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Adm.Kepulauan Seribu	Prop.	D.K.I. Jakarta
195.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Adm.Jakarta Pusat	Prop.	D.K.I. Jakarta
196.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Adm.Jakarta Utara	Prop.	D.K.I. Jakarta
197.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Adm.Jakarta Barat	Prop.	D.K.I. Jakarta
198.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Adm.Jakarta Selatan	Prop.	D.K.I. Jakarta
199.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Adm.Jakarta Timur	Prop.	D.K.I. Jakarta

200.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Jawa Tengah	Prop.	Jawa Tengah
201.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Cilacap	Prop.	Jawa Tengah
202.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banyumas	Prop.	Jawa Tengah
203.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Purbalingga	Prop.	Jawa Tengah
204.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banjarnegara	Prop.	Jawa Tengah
205.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kebumen	Prop.	Jawa Tengah
206.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Purworejo	Prop.	Jawa Tengah
207.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Wonosobo	Prop.	Jawa Tengah
208.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Magelang	Prop.	Jawa Tengah
209.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Boyolali	Prop.	Jawa Tengah
210.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Klaten	Prop.	Jawa Tengah
211.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sukoharjo	Prop.	Jawa Tengah
212.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Wonogiri	Prop.	Jawa Tengah
213.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Karanganyar	Prop.	Jawa Tengah
214.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sragen	Prop.	Jawa Tengah
215.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Grobogan	Prop.	Jawa Tengah
216.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Blora	Prop.	Jawa Tengah
217.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Rembang	Prop.	Jawa Tengah
218.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pati	Prop.	Jawa Tengah
219.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kudus	Prop.	Jawa Tengah
220.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jepara	Prop.	Jawa Tengah
221.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Demak	Prop.	Jawa Tengah
222.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Semarang	Prop.	Jawa Tengah
223.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Temanggung	Prop.	Jawa Tengah
224.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kendal	Prop.	Jawa Tengah
225.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Batang	Prop.	Jawa Tengah
226.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pekalongan	Prop.	Jawa Tengah
227.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pemalang	Prop.	Jawa Tengah
228.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tegal	Prop.	Jawa Tengah
229.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Brebes	Prop.	Jawa Tengah
230.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Magetan	Prop.	Jawa Tengah
231.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Surakarta	Prop.	Jawa Tengah
232.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Salatiga	Prop.	Jawa Tengah
233.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Semarang	Prop.	Jawa Tengah
234.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pekalongan	Prop.	Jawa Tengah
235.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tegal	Prop.	Jawa Tengah
236.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Jawa Timur	Prop.	Jawa Timur
237.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pacitan	Prop.	Jawa Timur
238.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ponorogo	Prop.	Jawa Timur
239.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Trenggalek	Prop.	Jawa Timur
240.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tulungagung	Prop.	Jawa Timur
241.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Blitar	Prop.	Jawa Timur
242.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kediri	Prop.	Jawa Timur
243.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Malang	Prop.	Jawa Timur
244.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lumajang	Prop.	Jawa Timur
245.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jember	Prop.	Jawa Timur
246.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banyuwangi	Prop.	Jawa Timur
247.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bondowoso	Prop.	Jawa Timur
248.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Situbondo	Prop.	Jawa Timur
249.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Probolinggo	Prop.	Jawa Timur
250.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pasuruan	Prop.	Jawa Timur
251.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sidoarjo	Prop.	Jawa Timur
252.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mojokerto	Prop.	Jawa Timur
253.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jombang	Prop.	Jawa Timur
254.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Nganjuk	Prop.	Jawa Timur
255.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Madiun	Prop.	Jawa Timur
256.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Magetan	Prop.	Jawa Timur
257.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ngawi	Prop.	Jawa Timur
258.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bojonegoro	Prop.	Jawa Timur
259.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tuban	Prop.	Jawa Timur
260.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lamongan	Prop.	Jawa Timur
261.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Gresik	Prop.	Jawa Timur
262.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bangkalan	Prop.	Jawa Timur
263.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sampang	Prop.	Jawa Timur
264.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pamekasan	Prop.	Jawa Timur
265.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumenep	Prop.	Jawa Timur
266.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Kediri	Prop.	Jawa Timur
267.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Blitar	Prop.	Jawa Timur
268.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Malang	Prop.	Jawa Timur
269.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Probolinggo	Prop.	Jawa Timur
270.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pasuruan	Prop.	Jawa Timur
271.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Mojokerto	Prop.	Jawa Timur
272.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Madiun	Prop.	Jawa Timur
273.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Surabaya	Prop.	Jawa Timur

274.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Batu	Prop.	Jawa Timur
275.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	D. I. Yogyakarta		
276.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kulon Progo	Prop.	D. I. Yogyakarta
277.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bantul	Prop.	D. I. Yogyakarta
278.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Gunung Kidul	Prop.	D. I. Yogyakarta
279.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sleman	Prop.	D. I. Yogyakarta
280.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Yogyakarta	Prop.	D. I. Yogyakarta
281.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Bali		
282.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jembrana	Prop.	Bali
283.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tabanan	Prop.	Bali
284.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Badung	Prop.	Bali
285.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Gianyar	Prop.	Bali
286.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Klungkung	Prop.	Bali
287.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bangli	Prop.	Bali
288.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Karangasem	Prop.	Bali
289.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Buleleng	Prop.	Bali
290.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Denpasar	Prop.	Bali
291.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Nusa Tenggara Barat		
292.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lombok Barat	Prop.	Nusa Tenggara Barat
293.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lombok Tengah	Prop.	Nusa Tenggara Barat
294.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lombok Timur	Prop.	Nusa Tenggara Barat
295.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumbawa	Prop.	Nusa Tenggara Barat
296.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Dompu	Prop.	Nusa Tenggara Barat
297.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bima	Prop.	Nusa Tenggara Barat
298.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumbawa Barat	Prop.	Nusa Tenggara Barat
299.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lombok Utara	Prop.	Nusa Tenggara Barat
300.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Mataram	Prop.	Nusa Tenggara Barat
301.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bima	Prop.	Nusa Tenggara Barat
302.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Nusa Tenggara Timur		
303.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kupang	Prop.	Nusa Tenggara Timur
304.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Timor Tengah Selatan	Prop.	Nusa Tenggara Timur
305.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Timor Tengah Utara	Prop.	Nusa Tenggara Timur
306.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Belu	Prop.	Nusa Tenggara Timur
307.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Alor	Prop.	Nusa Tenggara Timur
308.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Flores Timur	Prop.	Nusa Tenggara Timur
309.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sikka	Prop.	Nusa Tenggara Timur
310.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ende	Prop.	Nusa Tenggara Timur
311.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ngada	Prop.	Nusa Tenggara Timur
312.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Manggarai	Prop.	Nusa Tenggara Timur
313.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumba Timur	Prop.	Nusa Tenggara Timur
314.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumba Barat	Prop.	Nusa Tenggara Timur
315.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lembata	Prop.	Nusa Tenggara Timur
316.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Rote Ndao	Prop.	Nusa Tenggara Timur
317.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Manggarai Barat	Prop.	Nusa Tenggara Timur
318.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Nagekeo	Prop.	Nusa Tenggara Timur
319.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumba Tengah	Prop.	Nusa Tenggara Timur
320.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumba Barat Daya	Prop.	Nusa Tenggara Timur
321.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Manggarai Timur	Prop.	Nusa Tenggara Timur
322.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Kupang	Prop.	Nusa Tenggara Timur
323.Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi	Prop.	Kalimantan Barat		
324.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sambas	Prop.	Kalimantan Barat
325.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pontianak	Prop.	Kalimantan Barat
326.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sanggau	Prop.	Kalimantan Barat
327.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ketapang	Prop.	Kalimantan Barat
328.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sintang	Prop.	Kalimantan Barat
329.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kapuas Hulu	Prop.	Kalimantan Barat
330.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bengkayang	Prop.	Kalimantan Barat
331.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Landak	Prop.	Kalimantan Barat
332.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Melawi	Prop.	Kalimantan Barat
333.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sekadau	Prop.	Kalimantan Barat
334.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kayong Utara	Prop.	Kalimantan Barat
335.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kubu Raya	Prop.	Kalimantan Barat
336.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pontianak	Prop.	Kalimantan Barat
337.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Singkawang	Prop.	Kalimantan Barat
338.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Kalimantan Selatan		
339.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tanah Laut	Prop.	Kalimantan Selatan
340.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kotabaru	Prop.	Kalimantan Selatan
341.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banjar	Prop.	Kalimantan Selatan
342.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Barito Kuala	Prop.	Kalimantan Selatan

343.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tapin	Prop.	Kalimantan Selatan
344.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Hulu Sungai Selatan	Prop.	Kalimantan Selatan
345.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Hulu Sungai Tengah	Prop.	Kalimantan Selatan
346.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Hulu Sungai Utara	Prop.	Kalimantan Selatan
347.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tabalong	Prop.	Kalimantan Selatan
348.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tanah Bumbu	Prop.	Kalimantan Selatan
349.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Balangan	Prop.	Kalimantan Selatan
350.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Banjarmasin	Prop.	Kalimantan Selatan
351.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Banjarbaru	Prop.	Kalimantan Selatan
352.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Kalimantan Tengah		
353.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kotawaringin Barat	Prop.	Kalimantan Tengah
354.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kotawaringin Timur	Prop.	Kalimantan Tengah
355.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kapuas	Prop.	Kalimantan Tengah
356.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Barito Selatan	Prop.	Kalimantan Tengah
357.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Barito Utara	Prop.	Kalimantan Tengah
358.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Katingan	Prop.	Kalimantan Tengah
359.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Seruyan	Prop.	Kalimantan Tengah
360.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sukamara	Prop.	Kalimantan Tengah
361.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lamandau	Prop.	Kalimantan Tengah
362.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Gunung Mas	Prop.	Kalimantan Tengah
363.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pulang Pisau	Prop.	Kalimantan Tengah
364.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Murung Raya	Prop.	Kalimantan Tengah
365.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Barito Timur	Prop.	Kalimantan Tengah
366.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Palangka Raya	Prop.	Kalimantan Tengah
367.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Kalimantan Timur		
368.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Paser	Prop.	Kalimantan Timur
369.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kutai Kartanegara	Prop.	Kalimantan Timur
370.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Berau	Prop.	Kalimantan Timur
371.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bulungan	Prop.	Kalimantan Timur
372.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Nunukan	Prop.	Kalimantan Timur
373.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Malinau	Prop.	Kalimantan Timur
374.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kutai Barat	Prop.	Kalimantan Timur
375.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kutai Timur	Prop.	Kalimantan Timur
376.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Penajam Paser Utara	Prop.	Kalimantan Timur
377.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tana Tidung	Prop.	Kalimantan Timur
378.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Balikpapan	Prop.	Kalimantan Timur
379.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Samarinda	Prop.	Kalimantan Timur
380.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tarakan	Prop.	Kalimantan Timur
381.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bontang	Prop.	Kalimantan Timur
382.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Gorontalo		
383.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Gorontalo	Prop.	Gorontalo
384.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Boalemo	Prop.	Gorontalo
385.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bone Bolango	Prop.	Gorontalo
386.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pohuwato	Prop.	Gorontalo
387.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Gorontalo Utara	Prop.	Gorontalo
388.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Gorontalo	Prop.	Gorontalo
389.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Sulawesi Selatan		
390.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Selayar	Prop.	Sulawesi Selatan
391.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bulukumba	Prop.	Sulawesi Selatan
392.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bantaeng	Prop.	Sulawesi Selatan
393.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jeneponto	Prop.	Sulawesi Selatan
394.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Takalar	Prop.	Sulawesi Selatan
395.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Gowa	Prop.	Sulawesi Selatan
396.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sinjai	Prop.	Sulawesi Selatan
397.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bone	Prop.	Sulawesi Selatan
398.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Maros	Prop.	Sulawesi Selatan
399.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pangkajene dan Kepulauan	Prop.	Sulawesi Selatan
400.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Baru	Prop.	Sulawesi Selatan
401.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Soppeng	Prop.	Sulawesi Selatan
402.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Wajo	Prop.	Sulawesi Selatan
403.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sidenreng Rappang	Prop.	Sulawesi Selatan
404.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pinrang	Prop.	Sulawesi Selatan
405.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Enrekang	Prop.	Sulawesi Selatan
406.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Luwu	Prop.	Sulawesi Selatan
407.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tana Toraja	Prop.	Sulawesi Selatan
408.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Luwu Utara	Prop.	Sulawesi Selatan
409.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Luwu Timur	Prop.	Sulawesi Selatan
410.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Toraja Utara	Prop.	Sulawesi Selatan
411.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Makassar	Prop.	Sulawesi Selatan
412.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pare-Pare	Prop.	Sulawesi Selatan
413.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Palopo	Prop.	Sulawesi Selatan

414. Kepala Dinas Perhubungan	Prop. Sulawesi Tenggara	
415.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kolaka	Prop. Sulawesi Tenggara
416.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Konawe	Prop. Sulawesi Tenggara
417.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Muna	Prop. Sulawesi Tenggara
418.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Buton	Prop. Sulawesi Tenggara
419.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Konawe Selatan	Prop. Sulawesi Tenggara
420.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bombana	Prop. Sulawesi Tenggara
421.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Wakatobi	Prop. Sulawesi Tenggara
422.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kolaka Utara	Prop. Sulawesi Tenggara
423.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Konawe Utara	Prop. Sulawesi Tenggara
424.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Buton Utara	Prop. Sulawesi Tenggara
425.Kepala Dinas Perhubungan	Kota Kendari	Prop. Sulawesi Tenggara
426.Kepala Dinas Perhubungan	Kota Bau-Bau	Prop. Sulawesi Tenggara
427. Kepala Dinas Perhubungan	Prop. Sulawesi Tengah	
428.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Banggai	Prop. Sulawesi Tengah
429.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Poso	Prop. Sulawesi Tengah
430.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Donggala	Prop. Sulawesi Tengah
431.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Toli-Toli	Prop. Sulawesi Tengah
432.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Buol	Prop. Sulawesi Tengah
433.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Morowali	Prop. Sulawesi Tengah
434.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Banggai Kepulauan	Prop. Sulawesi Tengah
435.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Parigi Moutong	Prop. Sulawesi Tengah
436.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Tojo Una-Una	Prop. Sulawesi Tengah
437.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Sigi	Prop. Sulawesi Tengah
438.Kepala Dinas Perhubungan	Kota Palu	Prop. Sulawesi Tengah
439. Kepala Dinas Perhubungan	Prop. Sulawesi Utara	
440.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bolaang Mongondow	Prop. Sulawesi Utara
441.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Prop. Sulawesi Utara
442.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Prop. Sulawesi Utara
443.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Minahasa	Prop. Sulawesi Utara
444.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kepulauan Sangihe	Prop. Sulawesi Utara
445.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kepulauan Talaud	Prop. Sulawesi Utara
446.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Minahasa Selatan	Prop. Sulawesi Utara
447.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Minahasa Utara	Prop. Sulawesi Utara
448.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Minahasa Tenggara	Prop. Sulawesi Utara
449.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Prop. Sulawesi Utara
450.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Prop. Sulawesi Utara
451.Kepala Dinas Perhubungan	Kota Sitaro	Prop. Sulawesi Utara
452.Kepala Dinas Perhubungan	Kota Manado	Prop. Sulawesi Utara
453.Kepala Dinas Perhubungan	Kota Bitung	Prop. Sulawesi Utara
454.Kepala Dinas Perhubungan	Kota Tomohon	Prop. Sulawesi Utara
455.Kepala Dinas Perhubungan	Kota Kotamobagu	Prop. Sulawesi Utara
456. Kepala Dinas Perhubungan	Prop. Sulawesi Barat	
457.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Mamuju Utara	Prop. Sulawesi Barat
458.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Mamuju	Prop. Sulawesi Barat
459.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Mamasa	Prop. Sulawesi Barat
460.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Polewali Mandar	Prop. Sulawesi Barat
461.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Majene	Prop. Sulawesi Barat
462. Kepala Dinas Perhubungan	Prop. Maluku	
463.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Maluku Barat Daya	Prop. Maluku
464.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Maluku Tengah	Prop. Maluku
465.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Maluku Tenggara	Prop. Maluku
466.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Maluku Tenggara Barat	Prop. Maluku
467.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Buru	Prop. Maluku
468.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Buru Selatan	Prop. Maluku
469.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Seram Bagian Timur	Prop. Maluku
470.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Seram Bagian Barat	Prop. Maluku
471.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kepulauan Aru	Prop. Maluku
472.Kepala Dinas Perhubungan	Kota Ambon	Prop. Maluku
473.Kepala Dinas Perhubungan	Kota Tual	Prop. Maluku
474. Kepala Dinas Perhubungan	Prop. Maluku Utara	
475.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Halmahera Barat	Prop. Maluku Utara
476.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Halmahera Tengah	Prop. Maluku Utara
477.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Halmahera Utara	Prop. Maluku Utara
478.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Halmahera Selatan	Prop. Maluku Utara
479.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kepulauan Sula	Prop. Maluku Utara
480.Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Halmahera Timur	Prop. Maluku Utara
481.Kepala Dinas Perhubungan	Kota Ternate	Prop. Maluku Utara

482.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tidore Kepulauan	Prop.	Maluku Utara
483.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Papua		
484.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Merauke	Prop.	Papua
485.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jayawijaya	Prop.	Papua
486.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jayapura	Prop.	Papua
487.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Nabire	Prop.	Papua
488.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Yapen	Prop.	Papua
489.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Biak Numfor	Prop.	Papua
490.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Puncak Jaya	Prop.	Papua
491.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Paniai	Prop.	Papua
492.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mimika	Prop.	Papua
493.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sarmi	Prop.	Papua
494.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Keerom	Prop.	Papua
495.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pegunungan Bintang	Prop.	Papua
496.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Yahukimo	Prop.	Papua
497.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tolikara	Prop.	Papua
498.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Waropen	Prop.	Papua
499.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Boven Digoel	Prop.	Papua
500.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mappi	Prop.	Papua
501.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Asmat	Prop.	Papua
502.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Supiori	Prop.	Papua
503.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mamberamo Raya	Prop.	Papua
504.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mamberamo Tengah	Prop.	Papua
505.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Yalimo	Prop.	Papua
506.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lanny Jaya	Prop.	Papua
507.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Nduga	Prop.	Papua
508.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Puncak	Prop.	Papua
509.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Dogiyai	Prop.	Papua
510.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Jayapura	Prop.	Papua
511.Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Papua Barat		
512.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sorong	Prop.	Papua Barat
513.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Manokwari	Prop.	Papua Barat
514.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Fakfak	Prop.	Papua Barat
515.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sorong Selatan	Prop.	Papua Barat
516.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Raja Ampat	Prop.	Papua Barat
517.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Teluk Bintuni	Prop.	Papua Barat
518.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Teluk Wondama	Prop.	Papua Barat
519.Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kaimana	Prop.	Papua Barat
520.Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Sorong	Prop.	Papua Barat
521.Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi				
522.Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Bekasi				
523.Kepala Balai Diklat Perhubungan, Bali				
524.Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Tegal				
525.Kepala Balai Diklat ASDP, Palembang				
526.Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Jakarta				
527.Direksi Perum DAMRI, Jakarta				
528.Direksi Perum PPD, Jakarta				
529.Kepala UPT Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi				
530.Kepala UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangau				
531.Kepala UPT Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo				
532.Kepala UPT Balai Pengujian Laik Jalan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Bekasi				
533.Kepala Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP) Jambi, Provinsi Jambi				
534.Kepala Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP) Denpasar, Provinsi Bali				
535.Kepala Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP) Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah				
536.Kepala Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah				
537.Kepala Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) Merak, Provinsi Banten				
538.Kepala Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) Lembar, Provinsi Nusa Tenggara Barat				
539.Kepala Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) Pagimana, Provinsi Sulawesi Tengah				
540.Kepala Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) Gilimanuk, Provinsi Bali				
541.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Merak				
542.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Bakauheni				
543.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Surabaya				
544.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ketapang				
545.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Lembar				
546.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kupang				
547.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kayangan				
548.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Balikpapan				
549.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Bajoe				

- 550.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Bangka
- 551.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Luwuk
- 552.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Sape Bima
- 553.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ternate
- 554.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Bitung
- 555.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ambon
- 556.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Biak
- 557.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Batam
- 558.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Pontianak
- 559.Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Bau-Bau
- 560.Kepala Bidang Media Massa dan Opini Publik, Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan